



Koran Sindo (Hal. 2)

Senin, 6 April 2020

Pemprov Alokasi Anggaran Capai Rp81 Miliar

Penanganan Covid-19, Perkuat Sektor Kesehatan hingga Dampak Sosial

MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ternyata sudah menambah alokasi anggaran dalam penanganan virus korona (Covid-19) di Bumi Nyiur Melambai. Anggaran tersebut diperuntukan untuk sektor kesehatan dan dampak sosial yang ditimbulkan.

Sekdaprov Sulut Edwin Silangen mengatakan, penyiapan alokasi anggaran tersebut sudah disampaikan kepada pemerintah pusat lewat video telekonferensi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait penanganan virus korona.

Dia menyebut, anggaran tersebut dibagi dua, yakni Rp48,4 miliar untuk penanganan penyebaran Covid-19, dan kedua untuk penanganan

dampak sosial sebesar Rp45,7 miliar. Silangen mengharapkan proses refocusing anggaran tersebut secepatnya dapat berjalan. Dalam waktu dekat, khususnya penanganan sosial akan dilaporkan ke DPRD Sulut. "Karena pemerintah pusat sudah menegaskan anggaran hanya dilaporkan tidak perlu difasilitasi," tuturnya.

Gubernur Olly Dondokambey sebelumnya sudah melakukan pertemuan

bersama para tokoh-tokoh agama di Provinsi Sulut.

"Sesuai data, kita mempunyai sekira 191 ribu masyarakat yang disimulasikan dengan presentasi masyarakat miskin dan rakyat yang mengalami dampak dari Covid-19. Sehingga alokasi anggaran yang dibutuhkan ini memang harus presisi, dan juga sesuai arahan pemerintah pusat," ungkapnya.

Silangen menuturkan, upaya Pemprov Sulut memperhatikan dampak Covid-19 yaitu dengan menjaga ketersediaan stok pangan. "Artinya, bahan pokok untuk masyarakat harus tercukupi. Kita menerima laporan ketersediaan pangan khususnya beras, masih aman hingga beberapa bulan kedepan. Kita juga sudah koordinasi dengan Bulog, untuk melakukan operasi



Sekdaprov Edwin Silangen saat melakukan video teleconference bersama Mendagri terkait penyiapan anggaran penanganan Covid-19.

pasar jika stoknya berkurang di pasaran," tuturnya.

Pemerhati politik dan pemerintahan Alfons Kim-

bal mengatakan, antisipasi dampak dari Covid-19 mesti menjadi perhatian serius pemerintah. Baik itu soal

penanganan dari sisi medis, termasuk ketersediaan APD dan perlengkapan lainnya, serta dampak sosial yang

ditimbulkan saat ini.

"Memang sudah seharusnya pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran dalam penanganan Covid-19," ujarnya.

Lanjut Kimbal, dengan adanya ketersediaan anggaran, pastinya akan memudahkan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan, ataupun menjalankan program penanganan yang lebih maksimal kepada masyarakat.

"Kalau bisa, kegiatan-kegiatan yang tidak penting anggarannya bisa dialokasikan dalam penanganan Covid-19. Ini memang mendesak dan sangat penting. Upaya antisipasi dan pencegahan mesti menjadi hal prioritas agar tidak memburuk kedepannya," tandas Kimbal.

□ rivco taluku